

## Asia Perlu Meningkatkan Akses ke Jasa Keuangan untuk Berkembang

Oleh [Sarwat Jahan](#), [Elena Loukoianova](#), [Cormac Sullivan](#), [Yongzheng Yang](#)

18 September 2018



Seorang pelanggan membayar di supermarket menggunakan ponsel pintarnya di Bangkok, Thailand: daerah perkotaan dan perdesaan di kawasan ini sudah umum menggunakan sarana pembayaran seluler untuk mengakses jasa keuangan (foto: Li Mangmang Xinhua News Agency/Newscom)

Di Asia, kawasan yang tumbuh paling cepat di dunia, memperluas akses ke jasa keuangan bagi lebih banyak orang akan mendorong pertumbuhan semakin tinggi, serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ketika orang-orang dan badan usaha dapat membuka rekening atau mendapatkan pinjaman, mereka akan lebih mampu meminjam dan mengelola tabungan dan pengeluaran mereka, yang semuanya akan memperlancar perputaran roda ekonomi.

[Penelitian terbaru kami](#) menunjukkan bagaimana Asia dapat diuntungkan dengan memberikan akses ke jasa keuangan kepada khalayak yang lebih luas.

## **Perhatikan kesenjangannya**

Kabar baiknya adalah bahwa kini semakin banyak orang di Asia menggunakan jasa keuangan dibandingkan sebelumnya, melalui ATM dan popularitas *mobile banking*. Namun, terlepas dari kemajuan ini, kesenjangan akses ke jasa keuangan dan penggunaannya—yang dikenal dengan istilah inklusi keuangan—masih ada di berbagai negara.

Misalnya, kesenjangan di Asia antara yang kaya dan miskin, warga perdesaan dan perkotaan, dan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Di India, hanya sekitar 52 persen laki-laki dewasa dari kelompok pendapatan termiskin memiliki rekening bank, dibandingkan dengan 80 persen dari kelompok pendapatan tertinggi.

Pendapatan bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan antara kalangan yang sering disebut dengan “*banked*” dan “*unbanked*” (yang memiliki akses ke jasa perbankan dan yang tidak). Keragaman kawasan yang begitu besar juga membuat faktor-faktor seperti geografi, struktur sektor keuangan, dan kebijakan sebagai hal yang penting.

Menerapkan kebijakan yang memperluas akses ke jasa keuangan, termasuk dengan menggunakan *fintech* (*financial technology*-inovasi teknologi keuangan) untuk menyebarkan manfaat secara lebih luas dan efektif, dapat membantu mempersempit kesenjangan ini di Asia.

## **Manfaat dari akses keuangan yang luas**

Penelitian kami menemukan bahwa akses yang lebih besar ke jasa keuangan dapat membawa keuntungan ekonomi yang besar.

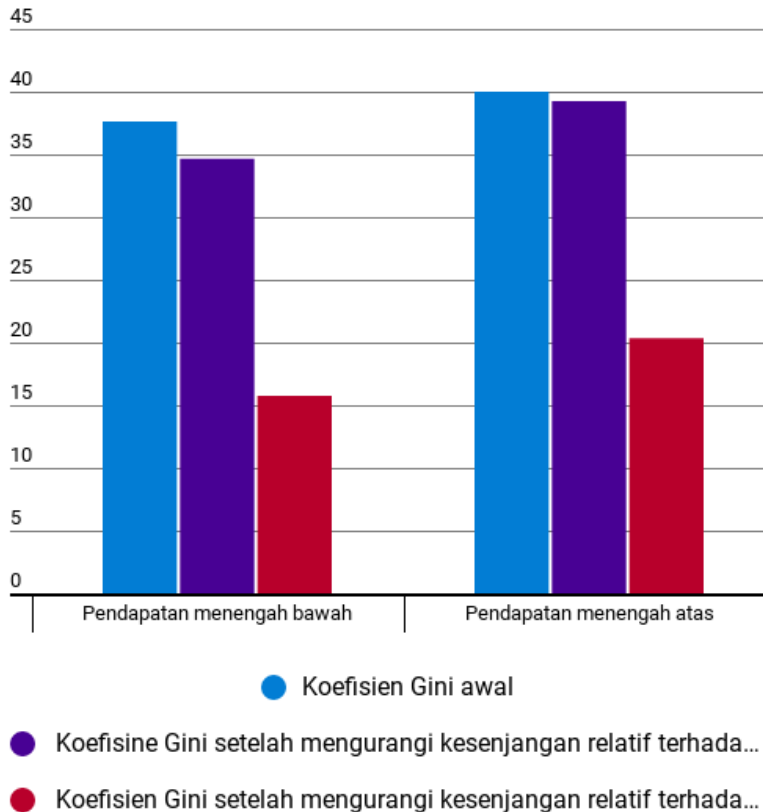
Akses yang lebih besar ke jasa keuangan dapat membantu orang miskin keluar dari kemiskinan dengan memungkinkan mereka memperoleh kredit dan asuransi untuk menjalankan usaha, berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan, mengelola risiko, dan mengatasi guncangan keuangan—yang semuanya dapat menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini sangat penting bagi negara-negara berpendapatan rendah seperti Myanmar dan Nepal, di mana kurang dari 40 persen rumah tangga memiliki rekening bank.

Lebih jauh lagi, kami menemukan bahwa andai semua negara Asia yang aksesnya terhadap barang dan jasa keuangannya tidak begitu baik, meningkat ke tingkat seperti di Thailand—negara kekuatan ekonomi baru (*emerging market economy*) di Asia yang terdepan dalam inklusi keuangan—kemiskinan di kawasan ini dapat menurun sekitar 4 persen atau sekitar 20 jutaan orang.

## Menurunkan Ketimpangan

Akses yang lebih luas ke jasa keuangan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan di Asia.

(Penurunan Koefisien Gini jika suatu negara meningkatkan inklusi keuangan hingga ke tingkat negara-negara lain di kawasan, dalam persen)



Sumber: World Development Indicators, dan prakiraan staf IMF.

Catatan: Pengelompokan pendapatan berdasarkan batasan Bank Dunia.



Penelitian kami lebih lanjut lagi menunjukkan bahwa memperluas akses ke jasa keuangan, terutama untuk rumah tangga miskin, dapat meningkatkan peluang ekonomi dan penghidupan mereka, yang lebih lanjut akan menurunkan ketimpangan pendapatan secara umum di suatu negara.

Dengan menggunakan ukuran statistik distribusi pendapatan, kami menemukan bahwa ketika negara-negara memperluas akses ke jasa keuangan ke tingkat seperti di Singapura—di mana

akses ke jasa keuangan yang diperlukan dan terjangkau tersedia luas—ketimpangan turun sebanyak 10-20 poin persentase dari tingkat 30-43 persen saat ini.

Contohnya, jika Laos dapat mencapai tingkat inklusi keuangan seperti Thailand, ketimpangan pendapatan akan turun sebesar lima poin persentase—ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak tahun 2002.

Inklusi keuangan juga penting karena dapat meningkatkan efektivitas kebijakan makroekonomi.

Sebagai contoh, kami menemukan bahwa inklusi keuangan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik. Ketika lebih banyak rumah tangga dan usaha mendapatkan akses ke jasa keuangan, pemerintah dapat langsung mengirimkan transfer dan pembayaran ke rekening pribadi dan bisnis. Hal ini membantu mengurangi pemborosan dalam belanja pemerintah, yang berpotensi mengalihkan sumber daya yang dapat mendorong pertumbuhan dan memberi manfaat yang luas, seperti belanja sosial.

### **Teknologi Keuangan (*Fintech*) mengalami peningkatan**

Mengingat pentingnya akses terhadap jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan, inovasi teknologi dalam jasa keuangan—atau yang biasa dikenal sebagai *fintech*—dapat menjadi sarana penting untuk memperluas jasa keuangan ke kelompok-kelompok yang sebelumnya tereksklusi, berkat penghematan biaya dan aksesibilitas teknologi ini.

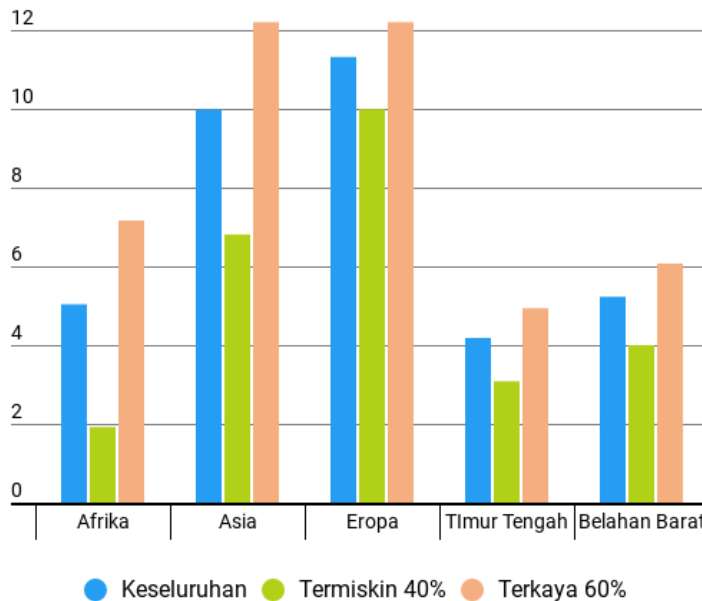
Tiongkok, misalnya, adalah pemimpin global untuk pembayaran bergerak (*mobile*), di mana 61 persen penduduknya melakukan pembayaran digital pada tahun 2017—merupakan 55 persen dari total pembayaran bergerak di kawasan dan melampaui beberapa negara berpendapatan tinggi. Negara-negara kekuatan ekonomi baru lainnya dan beberapa negara berkembang berpendapatan rendah sudah menggunakan *fintech*, misalnya Bangladesh, Kamboja, Indonesia, dan Malaysia.

Kawasan ini kini tampil sebagai pusat penyedia dan pengguna utama untuk jasa keuangan bergerak, kedua hanya setelah Afrika Sub-Sahara.

## Uang bergerak

Di Asia, kesenjangan antara kaya dan miskin dalam penggunaan telepon seluler untuk transaksi keuangan adalah salah satu yang terbesar di dunia.

(dalam persen)



Sumber: Global Findex.



Negara-negara kepulauan Pasifik, seperti Fiji, Samoa, kepulauan Solomon dan Tonga, semakin meningkat dalam penggunaan teknologi bergerak (*mobile technology*) untuk meningkatkan akses terhadap jasa keuangan. Perbankan bergerak (*mobile banking*) membantu mengatasi kekurangan infrastruktur, dan kondisi geografi yang membuat jasa perbankan tradisional, seperti mengunjungi bank secara fisik, cukup sulit.

Meski dengan perkembangan-perkembangan tersebut, manfaat *fintech* di kawasan ini tidak tersebar merata, karena kesenjangan *fintech* di Asia antara perdesaan dan perkotaan adalah yang terbesar di dunia.

### Peningkatan akses keuangan diperlukan

Tidak ada kebijakan yang dapat berlaku umum untuk semua kondisi dan para pembuat kebijakan di Asia akan perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas keuangan dalam menerapkan berbagai kemungkinan paduan dari pilihan luas kebijakan yang ada.

Misalnya, berkembangnya jasa keuangan mikro di Bangladesh dan peningkatan pembayaran bergerak di Asia dan di banyak negara di Afrika menunjukkan secara jelas bahwa eksperimentasi sosial dan kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta (*public-private partnerships*) dapat memperdalam dan memperluas akses terhadap jasa keuangan, yang membantu menyebarkan secara lebih luas manfaat yang diterima.

Pada saat yang sama, melanjutkan penerapan reformasi dapat mengurangi biaya jasa keuangan, dan mendorong mereka yang tidak terjangkau perbankan untuk mengintegrasikan diri ke sektor keuangan akan juga membantu dalam hal ini.

Para pembuat kebijakan Samoa, misalnya, dalam Strategi Inklusi Keuangan Nasional negaranya telah menjadikan sebagai prioritas untuk merancang dan menentukan harga produk jasa keuangan secara tepat untuk memastikan pemanfaatan yang luas, misalnya oleh penduduk berpendapatan rendah.

Sebagai simpulan, penelitian kami menunjukkan bahwa negara-negara terbesar dan terkecil sama-sama menawarkan pelajaran mengenai bagaimana inklusi keuangan dapat ditingkatkan di Asia. Kuncinya adalah menempatkan rangkaian kebijakan yang tepat untuk setiap negara.

\*\*\*\*\*



**Sarwat Jahan** adalah Ekonom Senior di Departemen Asia dan Pasifik IMF. Sejak bergabung dengan IMF, ia telah bekerja di berbagai negara dengan program-program yang didukung IMF, termasuk di Sri Lanka, Myanmar, dan St. Kitts dan Nevis. Ia juga pernah bekerja di Departemen Strategi, Kebijakan, dan Kajian IMF di mana ia mengerjakan makalah kebijakan dan nota panduan dan juga mengembangkan panduan alat yang fokus pada negara-negara ekonomi pinggiran (*frontier*), negara berkembang dan negara-negara kecil. Karya penelitiannya fokus pada beberapa isu lintas negara termasuk kebijakan moneter, strategi pertumbuhan, restrukturisasi utang, keterbukaan neraca modal, inklusi dan pembangunan keuangan, dan tantangan yang dihadapi negara-negara kecil. Karya analisisnya yang terbaru fokus pada dampak ekonomi dari digitalisasi. Sebelum bergabung dengan IMF, ia bekerja di Bank Dunia mengevaluasi strategi-strategi negara di Brasil, Georgia, India, dan Peru. Ia juga mengajar di Universitas Tufts. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomika dari Universitas Dhaka dan gelar Doktor di bidang Ekonomika dari Universitas Cornell.



**Cormac Sullivan** adalah Asisten Peneliti di Departemen Asia Pasifik IMF, mencakup Bangladesh, Maladewa, dan Sri Lanka. Penugasan negara terakhirnya adalah di Palau. Sebelumnya ia bekerja di Departemen Statistik IMF, di mana ia secara ekstensif menangani persoalan harmonisasi statistik moneter dan keuangan di beberapa kesatuan mata uang (terutama di Komunitas Afrika Timur dan Persatuan Ekonomi dan Moneter Afrika Barat). Sebelum bergabung dengan IMF, ia bekerja di Bank Dunia melakukan evaluasi rerangka kebijakan ekonomi dan keuangan untuk negara-negara Afrika Barat. Ia juga telah bekerja untuk Pemerintah Burkina

Faso, dalam Dewan Ekonomi dan Sosial. Karyanya di IMF fokus pada prakiraan, penelitian ekonomi dan analisis kebijakan. Karya penelitian terakhirnya termasuk inklusi keuangan, *fintech*, lonjakan kredit, pariwisata dan aplikasi pembelajaran mesin (*machine-learning applications*).

Ia berkebangsaan Inggris dan memiliki gelar di bidang ekonomika dari Wadham College, Universitas Oxford (Sarjana) dan Universitas Johns Hopkins (Master).



**Elena Loukoianova** adalah Wakil Ketua Divisi pada Departemen Asia Pasifik IMF. Di IMF, ia telah bekerja pada isu-isu pemantauan negara dan keuangan, penggunaan teknologi keuangan (*fintech*), isu stabilitas keuangan, isu metodologi dan analitik dari analisis laporan neraca, kebijakan makroprudensial, alat analisis untuk mengkaji dan memonitor risiko sistemik, dan program IMF. Penugasan negara ia saat ini adalah Australia, dan ia adalah Kepala Misi untuk Tonga. Pada tahun 2008-10, ia menjabat Direktur dan Ekonom Senior (Rusia dan CIS) pada Penelitian Negara *Emerging Market* di *Barclays Capital*, dan adalah Ekonom Senior

pada *European Bank for Reconstruction and Development*. Penelitiannya saat ini fokus pada risiko politik, dampak utang rumah tangga terhadap kebijakan ekonomi, penerapan ekonomi dari teknologi *blockchain*, dan risiko sistemik. Ia memiliki gelar Doktor di bidang Ekonomika dari Universitas Cambridge, *England*, Doktor di bidang Matematika dan Universitas Negeri Ulyanovsk, Russia.



**Yongzheng Yang** saat ini menjabat sebagai Perwakilan Residen IMF di Filipina. Hingga baru-baru ini, ia adalah Wakil Ketua Divisi di Departemen Asia dan Pasifik IMF dan Kepala Misi IMF untuk Myanmar. Sebelumnya, ia adalah Perwakilan Menetap IMF di negara-negara kepulauan Pasifik dari tahun 2010 hingga 2014 dan menjabat sebagai Kepala Misi IMF untuk Papua Nugini dan Samoa.

Yang juga telah bekerja pada negara-negara di Afrika dan Asia Tengah. Sebelum bergabung di IMF pada tahun 2001, ia mengajar di *Australian National University* dan Universitas Macquarie selama 10 tahun. Peminatan penelitiannya

mencakup inklusi keuangan, perdagangan internasional, permodelan ekuilibrium umum, dan isu-isu pembangunan.